

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2011-2015

Arie Rachma Putri¹⁾

Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten
arierachma@aamklaten.ac.id

Nur Kabib²⁾

Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten
habib@aamklaten.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 hingga tahun 2015 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode yang digunakan dalam data adalah analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif. Disisi lain tingkat kemandirian keuangan daerah juga masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten. Selain itu dalam penggunaan dananya masih belum seimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Kata kunci: *kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang undangan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Otonomi mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam proses pembangunan dan memberikan implikasi semakin pentingnya peran analisis dalam kebijakan moneter (Atmoko,2014). Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini belum banyak

daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, untuk itu daerah mampu dan secara nyata bertahap dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Begitu juga dengan kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu untuk mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Klaten adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Bisma dan Susanto (2010) menemukan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 belum optimal yaitu ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan seperti ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, kemudian efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Sementara Pramono (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif serta memiliki kemampuan dalam membayar pinjaman.

Dalam penelitian Rahmayati (2016) yaitu mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 yang hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut belum optimal, namun pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah.

Hasil penelitian Machmud, Kawung dan Rompas (2014), bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 menunjukkan kinerja yang belum stabil dan tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat masih tinggi.

Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatra Utara (Suryani, Faisal, 2016). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Aceh harus lebih fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan prinsip efisiensi dan prioritas anggaran dibandingkan

dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014 (Sandi, I Wayan, Fridayana, 2016) menjelaskan hasil penelitian bahwa varian pendapatan dalam kategori baik, rasio derajat desentralisasi dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan yang positif, varian belanja dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan rasio belanja lebih banyak daripada belanja operasional, dan rasio efisiensi dalam kategori efisien.

Hasil penelitian Mariani (2013), mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Setelah Otonomi Daerah Kota/kabupaten di Sumatera Barat hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efisien, tetapi mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, kemudian tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didalam pembangunan semakin meningkat.

2. Landasan Teori

2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio keuangan daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah dan provinsi semakin rendah dan sebaliknya. Halim (2012) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Panduan dalam melihat hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007:169)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kinerja kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria Efektivitas keuangan daerah menurut Mahsun (2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	< 100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

Sumber : Mahsun (2009: 187)

Rasio efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

2.3 Rasio Kesenjangan

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti bahwa prosentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Rasio belanja operasi = $\frac{\text{Belanja operasi}}{\text{Total APBD}}$
- b. Rasio belanja modal = $\frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}}$

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang rasio belanja operasi maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamisasi kegiatan pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012).

2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode (Halim, 2012). Apabila pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dimana penelitian ini akan memberikan gambaran fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan pengumpulan data atau keterangan dari pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan, kemudian untuk mencari sumber teori serta pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pemerintah Pusat dan pinjaman}}$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan pemerintah pusat, propinsi serta pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2011	72.292.689.948	1.240.500.101.368	5,83
2012	85.359.960.640	1.383.267.638.453	6,17
2013	115.454.161.953	1.582.082.180.439	7,30
2014	177.922.415.860	1.673.049.937.033	10,63
2015	190.622.670.128	1.876.743.453.129	10,16

Sumber : data diolah

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014).

Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$

Hasil perhitungan rasio efektivitas pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2011-2015

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2011	71.580.476.000	72.292.689.948	101
2012	77.185.112.000	85.359.960.640	111
2013	85.574.358.000	115.454.161.953	135
2014	153.052.801.500	177.922.415.860	116
2015	168.467.842.500	190.622.670.128	113

Sumber : data sekunder diolah

3. Rasio Kesenjangan

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Belanja operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}}$$

Hasil perhitungan rasio kesenjangan pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Rasio Kesenjangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2011-2015

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total APBD (%)	Rasio Belanja Modal terhadap Total APBD (%)
2011	1.183.940.132.846	128.250.719.915	1.313.639.728.098	90	10
2012	1.256.522.421.515	182.607.554.683	1.439.682.035.855	87	13
2013	1.432.936.637.869	186.883.543.096	1.621.602.407.460	88	12
2014	1.429.935.374.104	268.557.035.809	1.884.326.293.738	76	14
2015	1.501.440.716.957	306.072.310.863	2.077.785.996.047	72	15

Sumber : data sekunder diolah

4. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD t0}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kab. Klaten tahun anggaran 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2011	72.292.689.948	1.364.126.507.762	-	-
2012	85.359.960.640	1.512.146.130.656	18,08	10,85
2013	115.454.161.953	1.735.602.421.246	35,26	14,78
2014	177.922.415.860	1.919.989.124.290	54,11	10,62
2015	190.622.670.128	2.177.820.728.857	7,14	13,43

Sumber : data sekunder diolah

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kab. Klaten tahun anggaran 2011-2015

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2011	1.183.940.132.846	128.250.719.915	-	-
2012	1.256.522.421.515	182.607.554.683	6,13	42,38
2013	1.432.936.637.869	186.883.543.096	14,04	2,34
2014	1.615.290.594.104	268.557.035.809	-0,21	43,70
2015	1.501.440.716.957	306.072.310.863	5,00	13,97

Sumber : data sekunder diolah

Pembahasan

1. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan pada tabel 3, nampak bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011 tingkat kemandirian sebesar 5,83%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,17% pada tahun 2012. Tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 7,30% , pada tahun 2014 meningkat menjadi 10,63% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 10,16%. Tetapi hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal masih sangat tinggi. Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama lima tahun memiliki tingkat kemandirian masih sangat rendah, yaitu dalam kategori pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat sangat dominan daripada pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-25%. Rasio kemandirian yang rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam membiayai pelaksanaan pemerintah serta pembangunan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan tabel 4 diatas bahwa rasio efektivitas Kabupaten Klaten pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 101% pada tahun 2011, 111% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 135%. Tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan 19% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 116%, begitu juga pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3% yaitu menjadi 113 % . Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Klaten sudah efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%.

3. Rasio Kesenjangan

Dari perhitungan rasio keserasian diatas yaitu pada tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan yaitu dari 90% (2011) menjadi 87% (2012), kemudian meningkat menjadi 88% (2013) dan mengalami penurunan kembali menjadi 76% (2014) dan 72% (2015). Sedangkan rasio belanja modal masih relatif kecil, walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2011 (10%) hingga tahun 2012 (13%). Pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 12% dan meningkat kembali pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 14% dan 15%.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 6, perhitungann rasio pertumbuhan pendapatan bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2014 rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 18,08%, 35,26% dan 54,11%. Tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya sebesar 7,14%. Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan hingga tahun 2013 yaitu

10,85% meningkat menjadi 14,78%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,62% dan kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu 13,43.

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja tampak pada tabel 7, bahwa belanja operasi mengalami kenaikan dari 6,13% pada tahun 2012 menjadi 14,04%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,21 dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 5%. Belanja modal pada tahun 2012 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 2,34%, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 43,70%, tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 13,97%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten jika dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah dan belum optimal. Pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada daerah dengan rasio kemandirian dibawah 25% yaitu rata-rata hanya sebesar 8.01%.
2. Efektifitas Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata 10% hingga 20%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2015, walaupun mengalami peningkatan dan penurunan tetapi masih termasuk dalam kriteria efektif.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam penggunaan dana masih belum seimbang, dikarenakan sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yaitu rata-rata sebesar 82%. Disisi lain rasio belanja modal terhadap APBD juga masih sangat rendah dengan rata-rata 12%.
4. Jumlah pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2012 hingga tahun 2014, walaupun pada tahun 2015 turun drastis menjadi 7,14% .begitu juga dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, 10,85% (2012), 14,78% (2013), 10,62% (2014) dan 13,43 (2015).

Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya serta memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan dengan Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang,
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten agar lebih proporsional dalam mengelola belanja, yaitu dengan mengurangi belanja operasional dan lebih meningkatkan belanja modal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kemenristek Dikti atas bantuan biaya pada skim penelitian kompetitif nasional tahun anggaran 2017-2018. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko ,C, (2014). BI: *Kajian Regional Untuk Ukur Perekonomian Nasional*. Antara News.com, diakses 13 maret 2015(<http://www.antaranews.com/berita>)
- Bisma, I.,D.,G.,dan H. Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Gewec Swara Edisi Khusus. Vol.4 No. 3 :75-86
- Halim, Abdul .2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Salemba Empat, Jakarta.
- Machmud,M.,G. Kawung, dan W.Rompas.2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.14 No. 2:1-13
- Machsum, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Mariani,L. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol.1 No. 2.
- Nuryanto, R., Tho'in, M., & Wardani, H. K. (2014). Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(01).
- Pramono,J.2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Surakarta)*. Jurnal Ilmiah Among Makarti. Vol.7. No.13 : 82-112
- Rahmayati, A. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal Eka Cida. Vol.1 No.1 Maret 2016. ISSN : 2503-3565 e-ISSN :2503-3689
- Saputra.S,Suwendra.I, Yudiatmaja.F. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol.4 tahun 2016
- Suryani, Basri. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan Di Sumatera Utara*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JEB), Vol.23 no. 1 Maret 2016. ISSN 1412-3126
- Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*